

KEBANGKITAN EKONOMI NADHLIYAH

Berly Martawardaya

Dosen FEUI, ekonom senior Indef dan Kepala Desk Ekonomi NU Profesional Circle

Pendirian NU pada tanggal 31 Januari 1926 oleh Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari didahului oleh tiga organisasi dengan wilayah kerja yang berbeda, yaitu Nahdlatul Tujjar (1918) yang muncul sebagai lambang gerakan ekonomi pedesaan, disusul dengan munculnya Tashwirul Afkar (1922) sebagai gerakan keilmuan dan kebudayaan, dan Nahdlatul Wathon (1924) sebagai gerakan politik dalam bentuk pendidikan.

Bahkan pada *Staoeten Perkoempoelan NU*, setingkat Anggaran Dasar organisasi, dinyatakan, "berikhtiar memperbanyak madrasah (sekolah)... begitoe djoega dengan ichwalnja anak-anak jatim dan orang fakir miskin serta mendirikan badan-badan untoek memadjukan oeroesan pertanian dan perniagaan yang tiada dilarang oleh sjari'ah agama Islam."

Merupakan sebuah pertanyaan besar mengapa dan bagaimana sebuah gerakan yang sejak awalnya menyadari peran penting penguatan ekonomi, bahkan berdirinya didahului oleh badan sayap ekonomi, meletakkan ekonomi di baris belakang begitu lama.

Tulisan ini akan mengulas pemikiran ekonomi dan dampaknya bagi ekonomi Indonesia dari masa ke masa. Dua perdebatan besar, yang masih terus berlangsung sampai sekarang, antara para ekonom dan mazhab ekonomi akan dibahas pada bagian ini, yaitu antara pasar dan pemerintah serta antara pertumbuhan dan pemerataan. Tulisan diakhiri dengan paparan berbagai peluang NU dalam membangun ekonomi umat di masa mendatang.

Antara Pasar dan Pemerintah

Bagai dua kutub magnet, kebijakan ekonomi bergeser dari dua ekstrem antara pemerintah dan pasar.

Mazhab klasik yang merajai abad 19 sampai dengan *Great Depression* percaya bahwa pasar dengan semboyan *laissez faire* (biarkan saja) adalah mekanisme alokasi yang terbaik. Jika harga terlalu tinggi maka permintaan akan menurun sehingga terjadi kelebihan penawaran dan harga menurun. Pengangguran adalah akibat dari pencari kerja yang tidak mau menerima gaji yang lebih rendah. Peran pemerintah semata menjaga keamanan dan dipenuhinya kontrak.



Meledaknya *Great Depression* di mana pada titik puncaknya hampir seperempat dari angkatan kerja Amerika Serikat menjadi pengangguran adalah pertanyaan besar yang tidak dapat di jawab oleh mazhab klasik. Turunnya harga tidak menyebabkan naiknya permintaan tapi malah mendorong perusahaan untuk mengurangi produksi dan mengurangi pegawai.

Keynes memberikan jawaban bahwa apabila permasalahan terjadi di sisi permintaan dan masyarakat tidak memiliki kepercayaan pada ekonomi dan lebih memilih menyimpan uang sehingga terjadi *paradox of thrift*. Satu orang yang menabung akan bermanfaat bagi dirinya, namun bila terlalu banyak orang yang menabung dan sedikit yang membelanjakan maka ekonomi bagaikan orang yang kurang darah sehingga lemah dan tidak dapat banyak bergerak. Pemikiran Keynes menjadi motor kebangkitan ekonomi paska perang kedua.

Namun periode itu juga diikuti oleh meningkatnya regulasi dan pengaturan harga oleh pemerintah yang kian ketat. Frederich Hayek dan Milton Friedman, dua peraih nobel ekonomi dari Universitas Chicago dari mazhab *neo-classic*, mengkritisi kemampuan pemerintah untuk mengatur ekonomi sedemikian detil. Deregulasi menjadi kebijakan yang diajukan dan pada beberapa sektor seperti penerbangan memberikan harga yang lebih murah dengan pelayanan yang membaik.

Jatuhnya Uni Sovyet membawa percaya diri yang amat tebal di para ekonom *neo-classic* yang percaya penuh pada kekuatan pasar. Fukuyama bahkan menyebut periode itu sebagai *end of history*, akhir dari sejarah. Di mana kapitalisme, dalam arti mereka, dan demokrasi menjadi tata

politik dan ekonomi dunia. Sekali lagi pemerintah dan regulasi dikesampingkan.

Deregulasi mengalami eskalasi pada tingkat global sehingga berbagai batasan yang diberlakukan negara untuk melindungi negaranya dianggap tidak relevan lagi. Kontrol terhadap lalu lintas devisa demi mengurangi volatilitas yang terlalu tinggi, ibarat air yang membawa manfaat namun menjadi permasalahan ketika terjadi fluktuasi yang terlalu tinggi antara kekeringan dan banjir. Ketergantungan pada *hot money* menjadi salah satu penyebab utama krisis moneter Asia 1997.

De-regulasi juga mendorong tumbuhnya instrumen keuangan derivatif yang kompleks dan tidak tercatat. Krisis *subprime mortgage* di Amerika Serikat dan Eropa disebabkan karena pembeli instrumen keuangan tidak lagi tahu dasar dan sumber nilai dari aset yang di representasikannya. Satu sertifikat dapat merupakan kombinasi nilai dari rumah, profit perusahaan, ternak dan mineral yang masing-masing memiliki pergerakan dan dinamika tersendiri.

Paul Krugman, pemenang nobel Ekonomi dari Universitas Princeton, menyerukan untuk menyederhanakan bank dan memperkuat regulasi sehingga pemerintah dapat mempersiapkan langkah-langkah persiapan dan deteksi dalam menghadapi potensi krisis finansial berikutnya.

Pendulum saat ini bergerak menuju regulasi dan *responsibility*. Bukan pengaturan semata, tapi *smart regulation* yang memungkinkan pelaku pasar mengetahui produk dan resiko yang mereka perdagangkan. Poin kedua adalah tidak lagi membiarkan kondisi di mana pelaku finansial mengambil resiko besar dan meraup keuntungan jika berhasil namun

meminta talangan pemerintah jika gagal.

Pertumbuhan dan Pemerataan

Perdebatan antara kedua kubu ini telah melalui beberapa tahapan. Pada periode pertama keduanya disodorkan sebagai pilihan. Antara 'pertumbuhan dengan kesenjangan' atau 'pemerataan dengan kemiskinan'. Arthur M. Okun melalui bukunya yang berpengaruh, *Equality and Efficiency: The Big Tradeoff* (1975) memberi contoh bahwa membangun pabrik dan bendungan membutuhkan sumberdaya yang banyak namun setelah beberapa saat akan memberikan hasil yang banyak. Sehingga lebih baik sumber daya yang sedikit dari banyak orang diakumulasi dan digabungkan.

Pemikiran ini melahirkan kebijakan *trickle down effect*, yaitu mendorong munculnya beberapa pengusaha besar yang lalu akan memberi manfaat ekonomi bagi kelompok ekonomi lainnya. Korea Selatan adalah salah satu penganut kuat kebijakan ini sehingga melahirkan konglomerat seperti Samsung dan Hyundai,

Pemikiran ekonomi juga masih didominasi oleh model Harrod-Domar, di mana yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi hanyalah jumlah modal yang bisa diinvestasikan. Paul Romer, P.M. (1986) mengkritik pemikiran ini dengan mengedepankan pentingnya investasi pada pengetahuan dan manusia. Mesin bisa rusak dan aus, namun penguatan modal manusia memiliki dampak jangka panjang.

Masalahnya kualitas modal manusia seringkali diwariskan. Orang tua yang miskin tidak dapat mendidik anaknya sampai pendidikan tinggi sehingga keturunannya tetap miskin dan sebaliknya. Peran

pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dari kelompok ekonomi lemah akan meningkatkan jumlah tenaga terdidik yang lalu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Persson and Tabellini (1994) dan para ekonom dari 'mazhab pertumbuhan' dari dalam (*endogenous growth*) mengambil kesimpulan bahwa kesenjangan adalah bahaya dari pertumbuhan karena berarti mengurangi jumlah *skilled workers*. Banerjee and Newman (1994) menganalisa pola tabungan masyarakat dimana penduduk miskin menempatkan uangnya dalam tabungan dengan proporsi jauh lebih sedikit dibandingkan kalangan menengah atas. Sehingga besarnya proporsi penduduk miskin akan mempunyai dampak terhadap rendahnya investasi dan rendahnya pertumbuhan.

Muhammad Yunus yang mendapat nobel perdamaian dari kiprahnya membangun Grameen Bank, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan akses modal ke kelompok masyarakat miskin mempunyai dampak yang permanen.

Paradigma pertumbuhan ekonomi sudah bergeser dari pertumbuhan versus pemerataan, ke pertumbuhan dan pemerataan sampai dengan pertumbuhan melalui pemerataan.

Menuju Ekonomi Nahdliyah

Bagaimana menerapkan konsep konsep ekonomi tersebut di NU? Adapun pemerintah dapat berperan dengan meningkatkan infrastruktur dan membantu menghapuskan buta huruf latin di mana lebih dari setengah terdapat di Jawa Timur yang merupakan basis NU. Peme-

rintah juga perlu meningkatkan kucuran program pemerintah di wilayah NU khususnya yang masih menjadi kantong kemiskinan demi mengurangi kesenjangan. Demikian juga dengan program peningkatan kualitas pendidikan dan skill.

Dari segi kebijakan, kita juga bisa berkaca pada India dan Cina yang menjaga masuknya ekspor dari negara asing di sektor pertanian yang merupakan mayoritas penyerap tenaga Kerja. Ibarat pemain tinju maka biarkanlah petinju dengan kelas serupa yang bertanding, namun jangan di adu antara petinju kelas berat dengan kelas bulu.

Dengan jumlah anggota yang lebih dari 30 juta maka dapat di tingkatkan potensinya dari konsumen ke produsen dan pemodal. Langkah pertama adalah membangun jaringan toko sehari-hari seperti Indomart di wilayah pesantren dan kantong-kantong NU. Paradigma sektor mikro sekarang adalah bermula dari ujung. Dengan memiliki toko maka profit dari konsumsi anggota NU akan kembali ke NU juga. Tentunya tahap ini sangat membutuhkan manajemen yang professional dan transparansi.

Dengan mendata produk apa yang laku di jaringan toko maka tahap berikutnya adalah mengembangkan aspek produksi. Aglomerasi dan pembagian tugas perlu di lakukan. Misalnya Rembang fokus di produksi makanan dan Madura di produksi toiletries seperti sabun, sampo, dll. Dengan pasar yang terjamin maka akan terjadi peningkatan *economies of scale* dan bahkan dapat melakukan penetrasi ke kota-kota besar. Semua ini membutuhkan modal.

Maka diperlukan gabungan dari iuran yang di intensifkan dan perbankan modern. Bila sepuluh persen saja dari anggota NU membayar iuran lima ribu rupiah sebulan maka akan didapat 150 milyar dalam setahun. Jumlah ini dapat mendanai kegiatan operasional pengurus cabang, wilayah, daerah dan pengurus besar. Namun investasi dalam pengembangan jalur distribusi dan investasi mempunyai dampak yang besar, dan jangka panjang.

Pengembangan perbankan di basis NU pernah dicoba, dan kegagalannya amatlah merugikan. Negara-negara industri di Asia seperti Jepang dan Korea Selatan mengandalkan pembiayaannya dari perbankan yang pas dengan watak NU. Semakin banyaknya Bank Asing di Indonesia merupakan suatu set-back. NU memiliki jaringan dan potensial penyimpan serta peminjam yang dapat menjadikannya dalam waktu singkat sebagai bank papan atas di Indonesia.

Pengembangan industrialisasi dapat dilakukan dengan bantuan para anggota NU yang pernah bekerja di industri baik di dalam maupun luar negeri. Tentunya pengembangan sekolah dan rumah sakit sebagai aksi sosial NU khususnya melindungi fakir miskin dan anak yatim perlu menjadi fokus tersendiri.

Rasulullah pernah mengingatkan bahwa pada akhir jaman umatnya akan banyak secara kuantitas namun lemah secara kualitas. Adalah suatu keharusan bagi NU mengambil elan vital Islam di segi ekonomi dan berperan meningkatkan kontribusi ekonomi umat Islam di Indonesia.